

## OPINI

# UMKM Berbenah Menghadapi Tarif Pajak Penghasilan Umum

Oleh : Gien Agustiniawansari

**D**OLEMIK yang terjadi di awal tahun pada tarif PPh final 0,5% dari omzet bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu tetap berlaku. Belum ada peraturan perajakan<sup>1</sup> baru yang mencaut berlakunya PP nomor 55 tahun 2022. Hal ini berarti bahwa UMKM sebagai Wajib Pajak dapat menghitung pajak penghasilan umum dengan menerapkan tarif PPh final 0,5%. Namun perlu disadari bahwa berlakunya generasi tarif tersebut ada batas waktunya. Setelah batas penerapan berakhir, Wajib Pajak, dalam hal ini UMKM wajib menghitung pajak penghasilan umum, yaitu tarif pasal 17 undang-undang pajak penghasilan.

Apakah yang sebaiknya akan dilakukan Wajib Pajak untuk menghadapi migrasi tarif ini? Selama periode yang ditetapkan memerlukan perajakan, mereka telah terbiasa menghitung pajak penghasilan dengan menggunakan prinsip presumptive tax, yaitu suatu prinsip pententuan besarnya pajak terutang menggunakan parameter selain penghasilan neto. Parameter yang digunakan dalam PP nomor 55 tahun 2022 untuk menghitung nilai PPh terutang adalah peredaran bruto. Nilai ini mencerminkan penghasilan Wajib Pajak yang belum memperoleh penghasilan. Batas waktu berakhirnya penerapan tarif final untuk Wajib Pajak berbeda. Hal ini tergantung pada awal mereka menerima<sup>2</sup> tarif tersebut dan bennik entitas Wajib Pajak. Batas waktu untuk Wajib Pajak orang pribadi berbeda dengan Wajib Pajak

pasal 59 Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2022 menguraikan batasan waktu penerapan pajak penghasilan yang bersifat final yang dikennen atas peredaran bruto tertentu. Wajib Pajak yang pere-daran bruto dalam satu tahun pajak tidak melebihi jumlah 4,8M dapat menerapkan PPh bersifat final. Batas waktu penerapan PPh bersifat final untuk Wajib Pajak orang pribadi (WPPOP) tujuh tahun. Batas waktu paling lama empat tahun untuk Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, firma, BUMDes (badan usaha milik desa), PT yang didirikan perseorangan dan perserikatan komanditer. Sedangkan Wajib Pajak badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) paling lama tiga tahun.

Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2022 yang sebelumnya mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 mengatur tentang penerapan tarif PPh bersifat final 0,5%. Tarif pajak ini mengikuti prinsip presumptive tax, yaitu suatu prinsip pententuan besarnya pajak terutang menggunakan parameter selain penghasilan neto. Parameter yang digunakan dalam PP nomor 55 tahun 2022 untuk menghitung nilai PPh terutang adalah peredaran bruto. Nilai ini mencerminkan penghasilan Wajib Pajak yang belum memperoleh penghasilan. Batas waktu berakhirnya penerapan tarif final untuk Wajib Pajak berbeda. Hal ini tergantung pada awal mereka menerima<sup>2</sup> tarif tersebut dan bennik entitas Wajib Pajak.

dak memberitahu maka dia anggap menyelenggarakan pembuktian dan menghitung nilai pajak terutang berdasarkan laba kena pajak. NPPN ini diperkenankan untuk Wajib Pajak orang pribadi.

Wajib Pajak yang akan menerapkan tarif PPh umum hendaknya berbenah diri. Sistem akuntansi yang diterapkan diperbaiki. Mereka yang menghitung nilai PPh berdasarkan laba kena pajak wajib menyelenggarakan pembuktian. Hal ini berarti bahwa Wajib Pajak melakukan migrasi sistem pencatatan ke sistem pembuktian. Wajib Pajak hendaknya melakukannya pencatatan atas harita, kewajiban, modal, biaya dan penghasilan. Proses akuntansi ini diakhiri dengan menyajikan laporan keuangan yang meliputi laporan posisi keuangan dan laporan hasil usaha. Laporan keuangan akan menjadi lampiran surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan.

Apabila Wajib Pajak mengalami kendala, mereka dapat mengandeng konsultan pajak untuk membantu diri untuk mendapatkan dunianya pendidikan. Peserta didik dibekali baik teori maupun praktik agar menjadi siap terjun di dunia kerja.

Keuntungan yang ber-



manfaat bagi Wajib Pajak dalam hal ini UMKM adalah mendapatkan tenaga kerja dari program magang untuk membantu menyiapkan diri menghadapi migrasi tarif PPh dari tarif bersifat final ke tarif umum, juga migrasi dari sistem pencatatan ke sistem pembuktian.

Pengarahan pelaku UMKM pada mahasiswa mengang dan pendampingan intensif dari dosen pem-bimbing lapangan sangat membantu UMKM dalam program magang. Jumlah yang dapat diperoleh dari kampus untuk diperlakukan pada UMKM dalam program magang. Mahasiswa mendapatkan bantuan UMKM dalam mencari teman pembuktian yang akan mempraktikan teori yang diperolehnya di kampus. Pihak Kampus bisa meng-gandeng pelaku UMKM untuk membekali mahasiswa pengalaman praktik di dunia nyata. Kerja sama ini bisa terwujud apabila kedua belah pihak saling membuka diri dan kiat memajukan dunia pendidikan. Peserta didik dibekali baik teori maupun praktik agar menjadi siap terjun di dunia kerja.

Gien Agustiniawansari,  
Dosen tetap Prodi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi  
Universitas Sanata Dharma  
Yogyakarta  
Email: gien@usd.ac.id

## CARA BARU DENGERIN UTYFM MEDARI



kupingin.utyfmedari.com



SENIN PAHING, 5 MEI 2025 6

F ulyfmedaripage @ulyfmedari utyfmedari.com

www.ulyfmedari.com